Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau

LAPORAN KINERJA

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

2021

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kepulauan Riau berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2021 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja tahun 2021 atas pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja LPMP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021. LPMP Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 menetapkan 2 sasaran dan 5 indikator kinerja. Secara umum LPMP Provinsi Kepulauan Riau berusaha mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan LPMP Provinsi Kepulauan Riau hingga akhir tahun 2021. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja LPMP Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021.

Bintan, 29 Januari 2022
Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Riau

Drs. Irwan Safii, M.Pd.
NIP196512311992031014

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSKLUSIF.....1

BAB I PENDAHULUAN.....3

A. GAMBARAN UMUM DAN STRUKTUR ORGANISASI.....3

B. DASAR HUKUM.....3

C. TUGAS DAN FUNGSI 4

D. ISU-ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN.....4

BAB II PERENCANAAN KINERJA.....5

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....7

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....7

B. REALISASI ANGGARAN.....35

BAB IV PENUTUP.....38

LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja LPMP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 menyajikan tingkat pencapaian 2 sasaran dengan 5 indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021. Tingkat ketercapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada bab III.

Capaian Kinerja Tahun 2021

		Capaian 2020	Target 2021	Capaian	Target 2024
SK 1. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan					
IKK 1.1	Presentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75	36,8 %	27.4 %	37,7 %	37,7 %
IKK 1.2	Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	3,2 %	5 %	1,73 %	5 %
IKK 1.3	Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	95,8 %	95,2 %	100 %	95,8 %
SK 2. Terwujudnya Tata Kelola LPMP Yang Baik					
IKK 2.1	Nilai Minimal SAKIP LPMP Provinsi Kepulauan Riau	BB	BB	A	A
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL	97,18	82	96,91	85

Kinerja Anggaran Tahun 2021

		Anggaran	Realisasi	% Kinerja Anggaran	Sisa
SK 1. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan					
IKK 1.1	Presentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75	898.198.000	897.573.000	99,93	625.000
IKK 1.2	Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	2.348.134.000	2.345.014.383	99,87	3.119.617
IKK 1.3	Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	8.600.000	8.600.000	100	0

Kinerja Anggaran Tahun 2021

- **SK 2.** Terwujudnya Tata Kelola LPMP Yang Baik

		Anggaran	Realisasi	% Kinerja Anggaran	Sisa
IKK 2.1	Nilai Minimal SAKIP LPMP Provinsi Kepulauan Riau	604.611.000	603.775.000	99,86	836.000
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL	10.538.865.000	10.538.865.000	99,53	49.572.562

**) Data Realisasi per 31 Desember 2021*

Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian target dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala tersebut.

KENDALA DAN SOLUSI YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET

KENDALA		SOLUSI
01 Rencana Pembentukan BBPMP	BBPMP	01 Mengikuti arahan Direktorat Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen
02 PPKM level 4 di Provinsi Kepri	PPKM	02 Menyesuaikan bentuk kegiatan
03 Refocussing Anggaran	ANGGARAN	03 menyesuaikan Pagu Anggaran

BAB I
PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM

LPMP Provinsi Kepulauan Riau berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

LPMP Provinsi Kepulauan Riau didirikan tanggal 18 Juli 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 73125/A4.4./KP/2013 dengan dilantiknya Dr. Ulfa Maria, M.Pd. sebagai Kepala

Sejak tanggal 2 Februari 2018 dipimpin oleh Drs. Irwan Safii, M.Pd.

Wilayah Kerja: Satuan Pendidikan Jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB di 7 Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.

Drs. Irwan Safii, M.Pd.
Kepala

Hendri Putra, S.Pd.
Kepala Subbagian TU

Kelompok Jabatan Fungsional

Didukung oleh:

5 orang Fungsional Tertentu

32 orang Pelaksana

27 orang PPNPN

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. PemenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
4. Permendikbud Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemendikbud.
5. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemendikbud Tahun 2020-2024.
6. Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Permendikbud Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kemendikbud

TUGAS DAN FUNGSI

TUGAS

Sesuai Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, LPMP Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

FUNGSI

A. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;

B. Pelaksanaan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;

C. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional;

D. Pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional;

E. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional;

F. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan

G. Pelaksanaan urusan administrasi.

ISU-ISU STRATEGIS/KENDALA

Kebijakan
Merdeka Belajar

- Eps. 1 Merdeka Belajar (Asesmen Nasional)
- Eps. 2 Kampus Merdeka (Kampus Mengajar)
- Eps. 7 Program Sekolah Penggerak

Penurunan
Capaian SNP

LPMP melakukan pendampingan terkait pembelajaran di masa pandemic Covid-19

Penyusunan
Peta mutu Daerah Tahap Akhir

LPMP mendampingi pemerintah daerah untuk Menyusun Peta Mutu dan Rekomendasi Peningkatan Mutu Pendidikan Daerah

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Pembangunan
Zona Integritas

LPMP Provinsi Kepri berupaya mencapai Predikat ZI/WBK

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Visi dan Misi

LPMP Provinsi Kepulauan Riau dalam mengemban amanat mendukung visi dan misi kementerian yang disusun berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045.

Adapun **Visi Kemendikbud 2020-2024** adalah: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, **Kemendikbud** sesuai tugas dan kewenangannya, **melaksanakan Misi Presiden** yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra;
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Tujuan Strategis:

T1. Meningkatnya Mutu satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah;

T2. Terwujudnya tata kelola Kemendikbudristek yang berkualitas.

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, LPMP Provinsi Kepulauan Riau menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui perjanjian kinerja tahun 2021. Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja LPMP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021.

	Target 2021	Target 2024	Anggaran dengan DIPA Awal	Anggaran dengan Revisi Akhir
SK 1. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan				
IKK 1.1 — Presentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75	27.4%	30.1%	3.334.799.000	898.198.000
IKK 1.2 — Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	5%	5%	1.122.296.000	2.348.134.000
IKK 1.3 — Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	95,2%	95,8%	579.808.000	8.600.000
SK 2. Terwujudnya tata Kelola LPMP yang baik				
IKK 2.1 — Nilai Minimal SAKIP LPMP Provinsi Kepulauan Riau	BB	A	941.000.000	604.611.000
IKK 2.2 — Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL	82	85	10.556.728.000	10.538.865.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2021, LPMP Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 2 sasaran dengan 5 indikator kinerja. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, LPMP Provinsi Kepulauan Riau melakukan pembinaan satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA dan SLB. Berikut informasi tingkat ketercapaiannya selama tahun 2021.

Sasaran #1 Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan

Pada tahun 2021 tidak dilakukan pemetaan mutu, sehingga data rapor terakhir yang dapat digunakan rapor mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 dengan capaian sebagai berikut:

Tren Capaian SNP per Jenjang di Kepulauan Riau

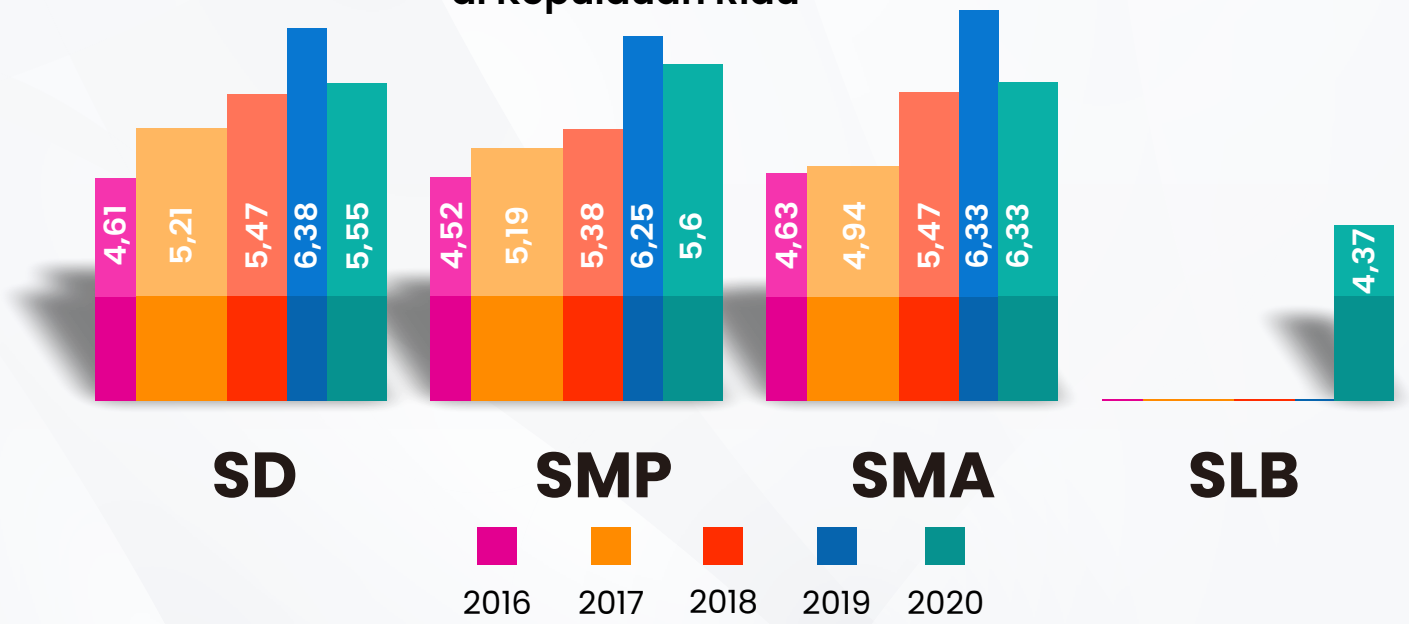

Dapat dilihat dari grafik di atas terjadi penurunan capaian SNP pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena proses pembelajaran tidak dapat berjalan dengan maksimal terkait kondisi pandemic Covid-19. Namun, berdasarkan data akreditasi tahun 2020 dan 2021, jumlah satuan Pendidikan yang terakreditasi A di Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan, seperti grafik di bawah:

Jumlah Sekolah Terakreditasi A

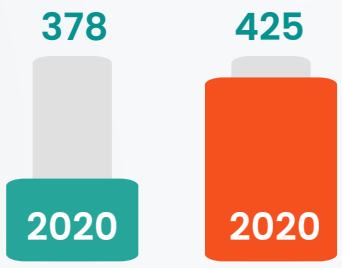

Sumber:
https://dapomart.kemdikbud.go.id/
diakses tanggal 14 Januari 2021
Pukul 15.00 WIB

Indikator kinerja #1.1. Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75

REALISASI 2020	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN	Target Akhir Renstra 2024	% Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra 2024
36,8	27,4	37,73	137,7	30.1	125,35

*Data Setditjen PAUD Dikdas dan Dikmen

Pengukuran dilakukan oleh Setditjen Paud Dikdas dan Dikmen, menggunakan pendekatan nilai rapor mutu sekolah pada aplikasi EDS tahun 2020, dengan cara melakukan konversi nilai 6 pada capaian rapor mutu di aplikasi EDS menjadi nilai 75. Berasarkan tabel diatas, capaian tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun 2020, dengan perolehan 37,73 atau 137,7 % dari target yang ditentukan.

***Metode perhitungan*:**

Capaian Indeks mutu yang berasal dari nilai kinerja sekolah laman penjaminan mutu pendidikan tahun sebelumnya

Target Nasional	Realisasi Nasional	% Nasional
27,4	*40,22*	*146,79*
Target LPMP Prov. Kepri	**Realisasi LPMP Prov. Kepri**	**% LPMP Prov. Kepri**
27,4	*37,73*	*137,7*

Capaian LPMP Provinsi Kepulauan Riau **sudah 137,7%** dari target, akan tetapi jika dibandingkan dengan capaian nasional masih berada di bawah.

Jumlah sekolah Provinsi Kepulauan Riau

SD	SMP	SMA	SLB
971	405	160	20

Sumber : https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/1/310000, diakses pada 17 Januari 2022 pukul 14.54 WIB.

Jumlah sekolah di Provinsi Kepri yang dapat diolah data mutunya: ***1275***

- Nilai yang besar dari ***75*** adalah ***481*** Sekolah
- Nilai yang kecil dari ***75*** adalah ***794*** Sekolah

Berdasarkan data di atas, jumlah sekolah yang dapat diolah data mutunya lebih sedikit dibandingkan jumlah sekolah secara keseluruhan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Pergantian operator sekolah sehingga ada informasi yang tidak tersampaikan;
2. Sekolah terlambat untuk melakukan pengisian dan sinkronisasi;
3. Beberapa operator sekolah sudah merasa melakukan sikronisasi tetapi data belum masuk ke server yang ada di pusat.

Besaran anggaran mengambil baseline pada program kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan realisasi sebagai berikut:

Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
Rp898.198.000	Rp897.573.000	99,93

UPAYA PENCAPAIAN IKK 1.1

Pencapaian

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang di Provinsi Kepulauan Riau.

01 Kegiatan

- Penyusunan dan pengolahan peta mutu
- Analisis data mutu
- Penyusunan rekomendasi peningkatan mutu

02 Kegiatan di Luar RKAKL

Membuka layanan konsultasi terkait pengisian aplikasi EDS tahun 2020 melalui Whatsapp, Zoom, dan aplikasi Sempena

03 Kendala Pencapaian IKK

Adanya perubahan model dalam pemetaan mutu pendidikan, semula menggunakan aplikasi Evaluasi Diri Sekolah (EDS) diganti dengan Asesmen Nasional yang sampai saat ini belum keluar profil maupun rapor pendidikan.

04 Upaya Antisipasi/Solusi

1. Melakukan pendampingan kepada daerah dalam menyusun buku mutu pendidikan berdasarkan hasil rapor mutu tahun 2020
2. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan

05 Dampak

Pemanfaatan peta mutu pendidikan sebagai acuan dalam peyusunan program peningkatan mutu pendidikan di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau.

Dokumentasi Kegiatan

Dokumentasi Kegiatan
Penyusunan dan Pengolahan
Data Mutu Serta Analisis Data Mutu

Dokumentasi Kegiatan
Penyusunan dan Pengolahan
Data Mutu Serta Analisis Data Mutu

Dokumentasi Kegiatan
Penyusunan dan Pengolahan
Data Mutu Serta Analisis Data Mutu

Dokumentasi Kegiatan
Penyusunan dan Pengolahan
Data Mutu Serta Analisis Data Mutu

Dokumentasi Kegiatan
penyusunan rekomendasi
peningkatan mutu

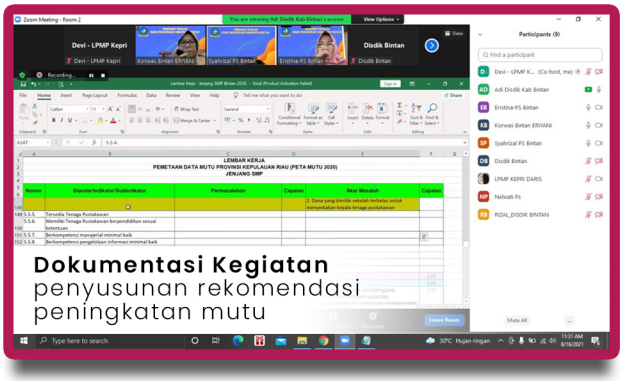

Dokumentasi Kegiatan
penyusunan rekomendasi
peningkatan mutu

Indikator kinerja #1.2. Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk

REALISASI 2020	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN	Target Akhir Renstra 2024	% Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra 2024
3,2%	5%	1,73%	289,02	5%	289,01

Metode Perhitungan:

% =(Σ jumlah siswa yg mencapai nilai minimum AKM + Σ jumlah siswa yg mencapai nilai minimum survey karakter)/(Σ siswa yang mengikuti survey AKM+ Σ siswa yang mengikuti survey karakter) x 100%

Tren Capaian IKK. 1.2

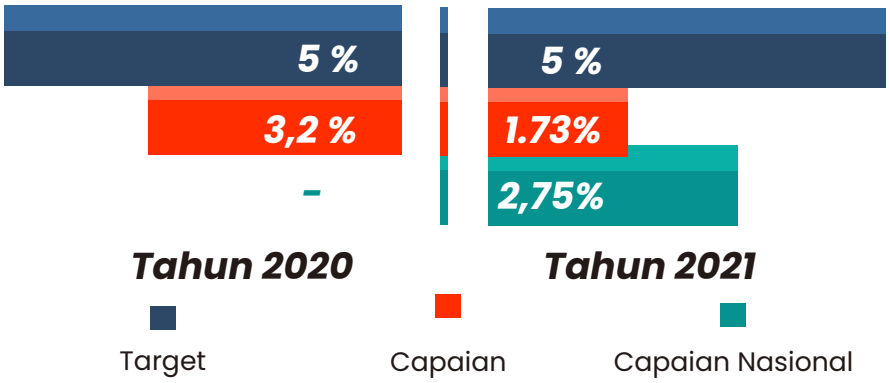

Data capaian IKK 1.2. pada tahun anggaran 2020 dan 2021 menggunakan data yang berbeda. Data capaian IKK 1.2. pada tahun 2020 menggunakan rapor mutu Pendidikan tahun 2019, dengan kondisi data capaian nasional tidak dapat ditampilkan. Data capaian IKK 1.2. tahun 2021 menggunakan data hasil asesmen nasional yang diolah oleh Pusat Asesmen – Pusdatin tahun 2021. Adapun hasil asesmen nasional tahun 2021 di Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Persentase Kesenjangan Asesmen Nasional

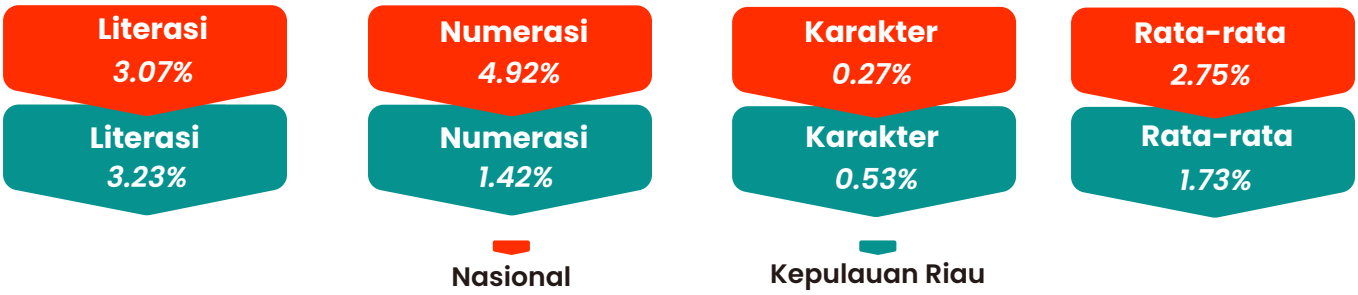

Capaian IKK 1.2. provinsi Kepulauan Riau jika dibandingkan dengan capaian nasional berada di atas rata-rata kesenjangan hasil asesmen nasional yaitu 1.73% dari capaian nasional 2.75%. Meskipun nilai capaian IKK 1.2. telah melebihi target capaian tahun 2021, namun jika dilihat dari angka kesenjangan capaian literasi dan karakter, capaian provinsi kepulauan riau masih berada di bawah capaian secara nasional yaitu 3.23% dari 3.07% capaian nasional literasi, 0.53% dari 0.27% capaian nasional.

Berikut ini adalah **capaian kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter** antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk pada masing-masing jenjang Pendidikan.

	Literasi	Numerasi	Karakter	Rata-rata
SD	0.38%	4.92%	0.36%	2.19%
SMP	5.77%	1.31%	0.56%	2.55%
SMA	8.72%	5.77%	0.87%	5.12%
SMK	6.71%	3.46%	0.95%	3.71%
SLB	4.23%	4.23%	1.41%	3.29%

Besaran anggaran mengambil baseline pada program kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan realisasi sebagai berikut:

Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
Rp2.348.134.000	Rp2.345.014.383	99,87

Dokumentasi Pelaksanaan ANBK

KEGIATAN MELALUI DUKUNGAN ANGGARAN

	Program/Kegiatan	Output	Outcome
SEKOLAH PENGGERAK	***Program Sekolah Penggerak***	• **Terdampinginya 22** Sekolah Penggerak pada Angkatan 1 • **Terpilihnya 65** sekolah penggerak pada Angkatan 2	• **Peningkatan mutu** Pendidikan di kabupaten/kota sasaran sekolah penggerak • **Disusunnya Pergub** terkait Program Sekolah Penggerak
ASESMEN NASIONAL	***Pendampingan Asesmen Nasional***	**Terdampinginya 1516** satuan Pendidikan jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB dalam penyelenggaraan Asesmen Nasional	• Terlaksananya **Asesmen Nasional** dengan lancar • **Terpetakannya mutu** Pendidikan di provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hasil asesmen nasional
KAMPUS MENGAJAR	***Pendampingan Mahasiswa Program Kampus Mengajar***	**Terdampinginya 296 Mahasiswa** Program Kampus Mengajar di Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga, Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang	**Meningkatnya mutu Pendidikan** pada 46 satuan Pendidikan sasaran program kampus mengajar Angkatan 1, dan 33 satuan Pendidikan pada Angkatan 2 di 6 Kabupaten/Kota yang didampingi.
KEBIJAKAN	***Koordinasi*** *Pendampingan Kebijakan Kemendikbudristek terkait dengan:* • BOS Reguler 2021, • Vaksinasi Covid-19 Bagi PTK, • Evaluasi Belajar dari Rumah, dan • Persiapan Pembelajaran Tatap Muka	7 pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah provinsi **memperoleh advokasi** dalam implementasi kebijakan kemendikbudristek	**Kebijakan Kemendikbudristek** dapat terimplementasi sesuai dengan ketentuannya.
KEMITRAAN	***Pelaksanaan*** *Kemitraan dan Implementasi Program Kerjasama* • Pedoman Mitigasi Risiko dan PHBS Ke Sekolah • Akun Pembelajaran belajar.id	• Terdampinginya 7 Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi dalam **melaksanakan Pedoman Mitigasi Risiko dan PHBS** • 311,444 atau 34.82% akun pembelajaran belajar.id telah diaktivasi (peringkat 4	**Meningkatnya mutu Pendidikan** di daerah khususnya dalam menjawab tantangan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi.

Kegiatan Pendukung Melalui Program Kemitraan dan di Luar Dukungan Anggaran

- Pelaksanaan **Penguatan Literasi Sains** melalui Inovasi Layanan Modis Pisan (LPMP mendukung program kolaborasi dengan PPPPTK IPA)
- **Pelatihan Calon Pengawas** di 2 Kabupaten/Kota dan **Pelatihan Calon Kepala Sekolah** di 5 Kabupaten/Kota
- **Besalam** (Belajar Sains Literasi Mudah Dipahami)
- **Inovasi melalui aplikasi vaksinasi**
- **LPMP Berbagi** (webinar informasi Pendidikan melalui zoom meeting)

Kendala

- Masih terdapat satuan Pendidikan yang sudah tidak aktif tetapi masih terdata di sistem verval TIK
- Pemahaman terhadap POS Asesmen Nasional masih kurang
- Belum terdokumentasikannya data PTK yang telah mendapatkan vaksinasi dengan baik
- Tim Sekretariat Pembina UKS di daerah belum melaksanakan tugas dengan optimal
- Mekanisme Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak belum sepenuhnya dipahami oleh berbagai pihak yang terlibat (PMO Daerah dan PMO LPMP)
- Tingkat Literasi Digital dalam Aktivasi dan pemanfaatan Akun Pembelajaran belajar.id masih rendah

Upaya Antisipasi/Solusi

- Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan Provinsi untuk melakukan verval TIK di tingkat daerah
- Melakukan sosialisasi POS Asesmen Nasional dan kegiatan verval TIK
- Advokasi Kepada Pemerintah daerah untuk segera melakukan Penetapan SK Baru Tim Sekretariat Pembina UKS

Upaya Antisipasi/Solusi

- Koordinasi dan Sosialisasi berkelanjutan melalui rapat rutin, rapat PMO bulanan, dan bincang-bincang santai bertema secangkir kopi sejuta inspirasi bersama para pemangku kepentingan.
- Pendampingan Literasi Digital: Aktivasi dan Pemanfaatan Akun Pembelajaran belajar.id
- Inovasi Melalui Aplikasi Sistem Pendataan Vaksinasi PTK Kepulauan Riau (SEPASI)

LPMP Provinsi Kepulauan Riau melakukan pendampingan peningkatan literasi digital melalui pelatihan aktivasi dan pemanfaatan akun pembelajaran belajar.id di seluruh satuan Pendidikan se-Kepulauan Riau dengan jumlah peserta sebagai berikut:

Kota Tj. pinang	*Kabupaten Bintan*	*Kota Batam*	*Kabupaten Lingga*	*Kabupaten Karimun*	*Kabupaten Anambas*	*Kabupaten Natuna*	*PSP Angkatan I*
617	***455***	***815***	***815***	***714***	***755***	***255***	***275***

Melalui penyelenggaraan kegiatan ini, Provinsi Kepulauan Riau menjadi provinsi dengan jumlah aktivasi akun pembelajaran tertinggi **peringkat 3** untuk kategori sekolah penggerak dan sekolah non-penggerak se-Indonesia dan **Peringkat Pertama** pada kategori Sekolah Penggerak.

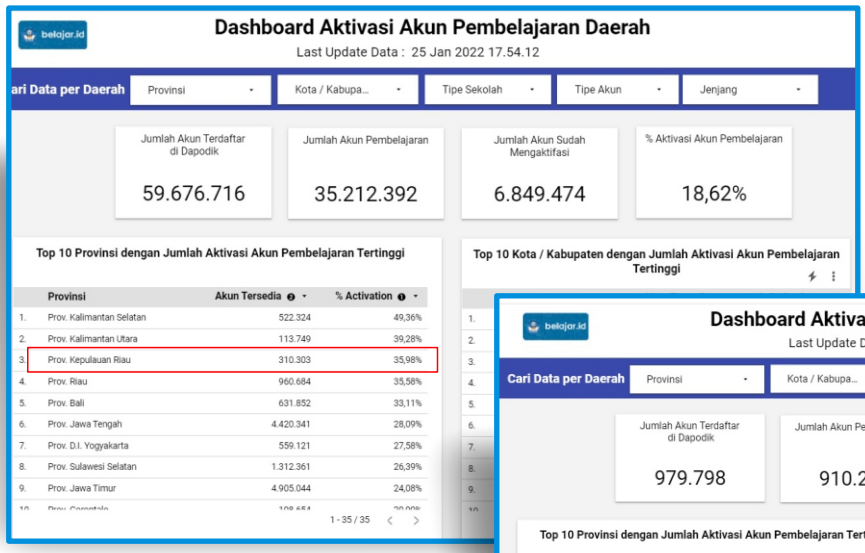

Dasboard
Aktivasi Akun Pembelajaran Sekolah Se - Prov. Kepri

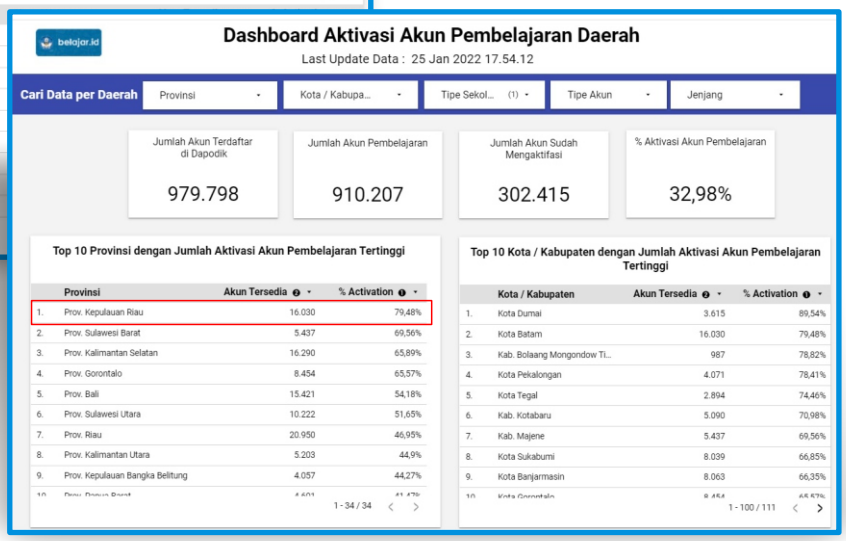

Dasboard
Aktivasi Akun Pembelajaran Sekolah Penggerak Angkatan I

Sumber: Dashboard Aktivasi Akun Pembelajaran Daerah, Last Update Data : 25 Jan 2022 17.54.00, diakses pada 28 Januari 2021 pukul 13.25 WIB

Upaya Antisipasi/Solusi

LPMP Provinsi Kepulauan Riau dalam mengantisipasi dan memberikan solusi dari kendala yang ditemukan dalam upaya pencapaian IKK 1.2., juga menghadirkan Inovasi Melalui Aplikasi Sistem Pendataan Vaksinasi PTK Kepulauan Riau (SEPASI).
Aplikasi dapat diakses melalui tautan: https://lpmpkepri.com/vaksin/media.php?p=home

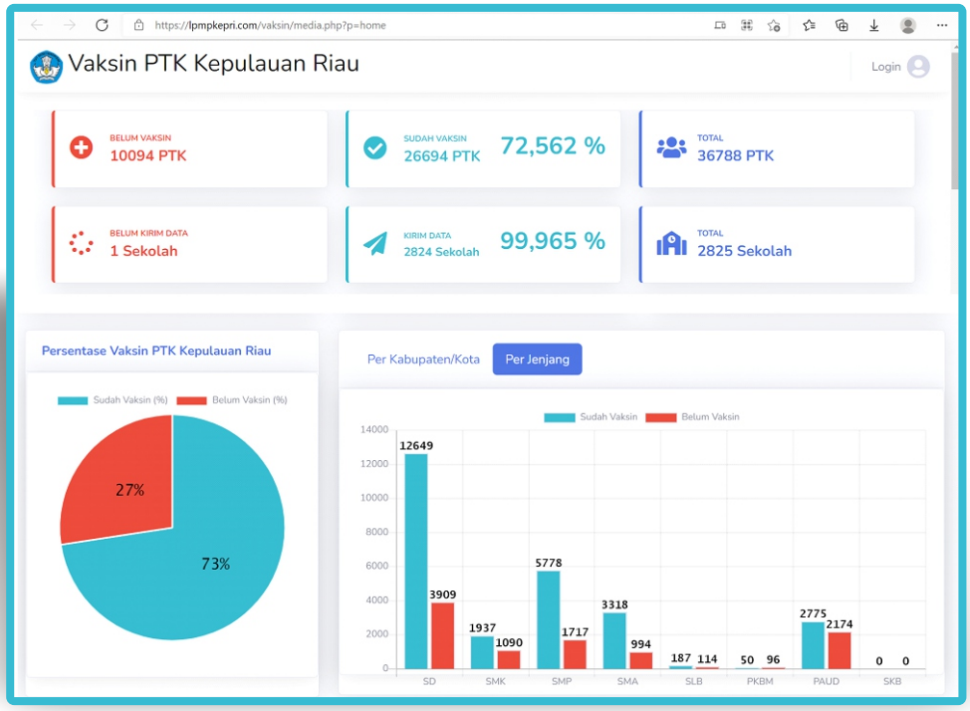

Dasboard Aplikasi SEPASI

Latar Belakang

1. Surat Edaran Bersama 4 Menteri dan Surat Plt. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek nomor 23412/A/GT.00.16/2021
2. Tidak Terdokumentasinya data PTK yang telah/belum/tidak dapat diberikan vaksin Covid-19

Keunggulan

1. Biaya pembuatan aplikasi Rp.0,-
2. Data Bersifat Realtime
3. Data Berbasis NIK
4. Validitas data lebih baik karena diinput oleh operator masing-masing sekolah
5. Mampu menampilkan data progress vaksinasi dari level Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga data PTK di setiap sekolah.

Penerima Manfaat

1. 2825 sekolah di Provinsi Kepulauan Riau
2. LPMP Provinsi Kepulauan Riau
3. Dinas Pendidikan di 7 pemerintah Kabupaten/ dan pemerintah provinsi
4. Dinas Kesehatan di 7 pemerintah Kabupaten/ dan pemerintah provinsi

Nilai Efisiensi

Seharusnya pendataan vaksinasi PTK menghabiskan anggaran senilai Rp. 371,086,500,- karena aplikasi ini anggaran yang dihemat senilai Rp. 247,391,000 atau 66.67%

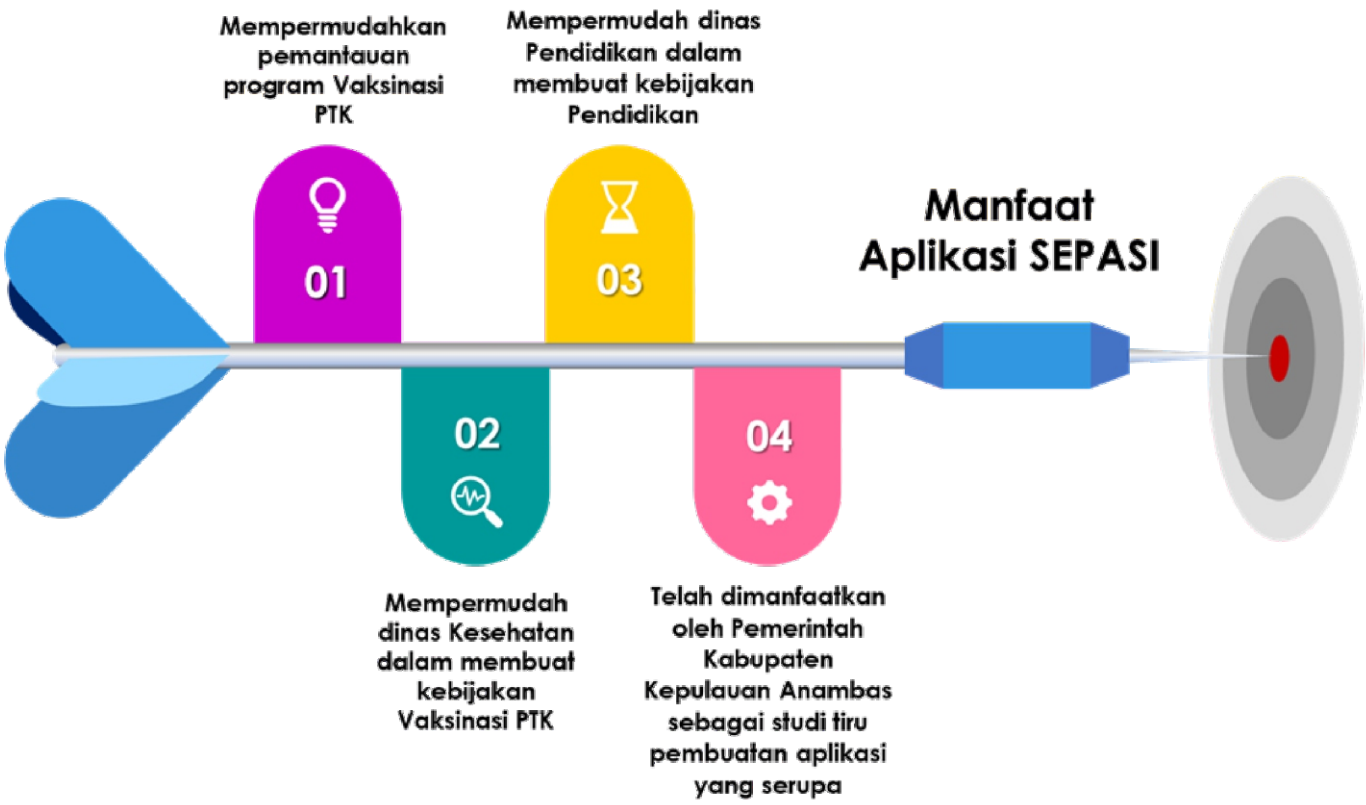

Rekapitulasi Vaksin PTK Kepulauan Riau

Show 10 entries Search:

No	% Sudah Vaksin	% Kirim Data	Kabupaten	Belum Vaksin	Sudah Vaksin	Total	Belum Kirim Data	Sudah Kirim Data	Total
1	67,371 %	100,000 %	Kab. Bintan	911 PTK	1881 PTK	2792 PTK	0 Sekolah	304 Sekolah	304 Sekolah
2	90,651 %	100,000 %	Kab. Karimun	444 PTK	4305 PTK	4749 PTK	0 Sekolah	351 Sekolah	351 Sekolah
3	52,417 %	100,000 %	Kab. Kepulauan Anambas	886 PTK	976 PTK	1862 PTK	0 Sekolah	155 Sekolah	155 Sekolah
4	32,934 %	100,000 %	Kab. Lingga	1513 PTK	743 PTK	2256 PTK	0 Sekolah	270 Sekolah	270 Sekolah
5	58,696 %	100,000 %	Kab. Natuna	931 PTK	1323 PTK	2254 PTK	0 Sekolah	235 Sekolah	235 Sekolah
6	76,035 %	99,903 %	Kota Batam	2947 PTK	9350 PTK	12297 PTK	1 Sekolah	1032 Sekolah	1033 Sekolah
7	91,423 %	100,000 %	Kota Tanjungpinang	252 PTK	2686 PTK	2938 PTK	0 Sekolah	202 Sekolah	202 Sekolah
8	71,257 %	100,000 %	Provinsi Kepulauan Riau (Dikmen) (Dikmen)	2196 PTK	5444 PTK	7640 PTK	0 Sekolah	275 Sekolah	275 Sekolah
No	% Sudah Vaksin	% Kirim Data	Kabupaten	Belum Vaksin	Sudah Vaksin	Total	Belum Kirim Data	Sudah Kirim Data	Total

Showing 1 to 8 of 8 entries Previous 1 Next

Tampilan Rekapitulasi Vaksin PTK di Kepulauan Riau

Dampak Pelaksanan Program/Kegiatan terhadap Pencapaian Sasaran Kegiatan Terhadap Penjaminan Mutu Pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau

Peningkatan penjaminan mutu Pendidikan di provinsi kepulauan Riau dapat dilihat dari berbagai aspek penilaian di antaranya melalui data capaian SNP, nilai akreditasi, data asesmen nasional, dan melalui kebijakan pendidikan yang diambil oleh pemerintah daerah.

Data SNP

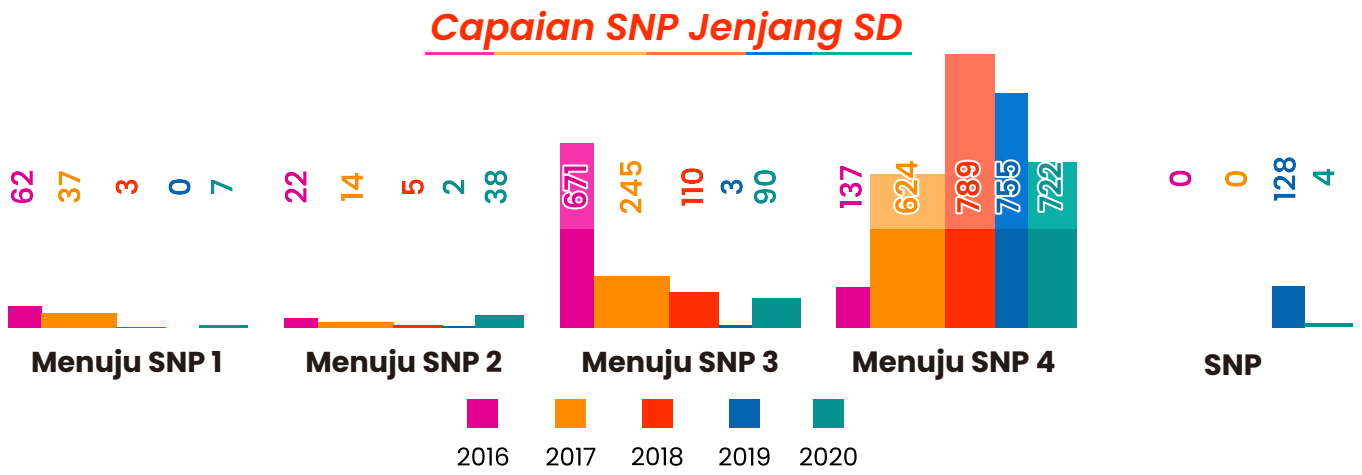

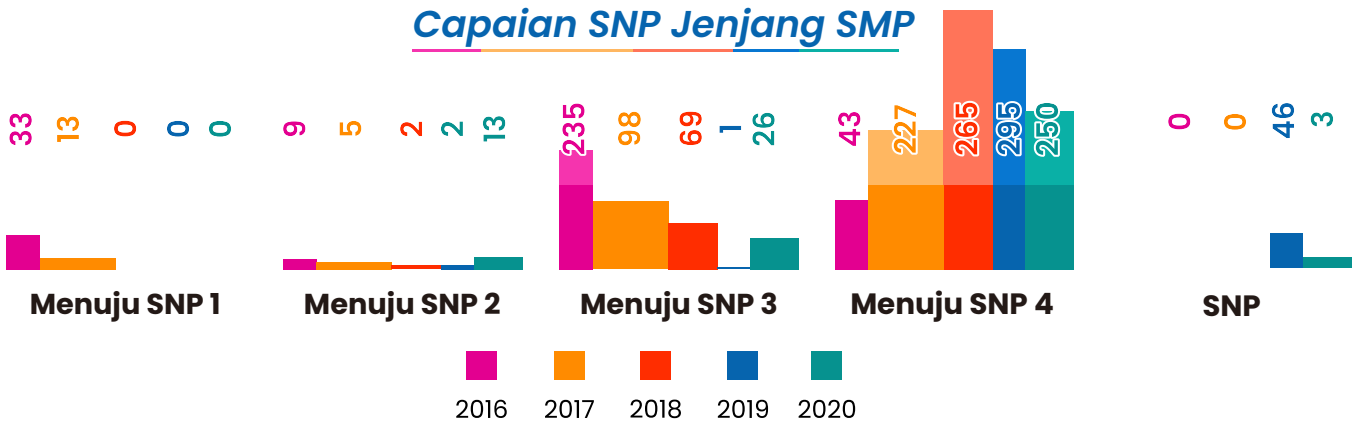

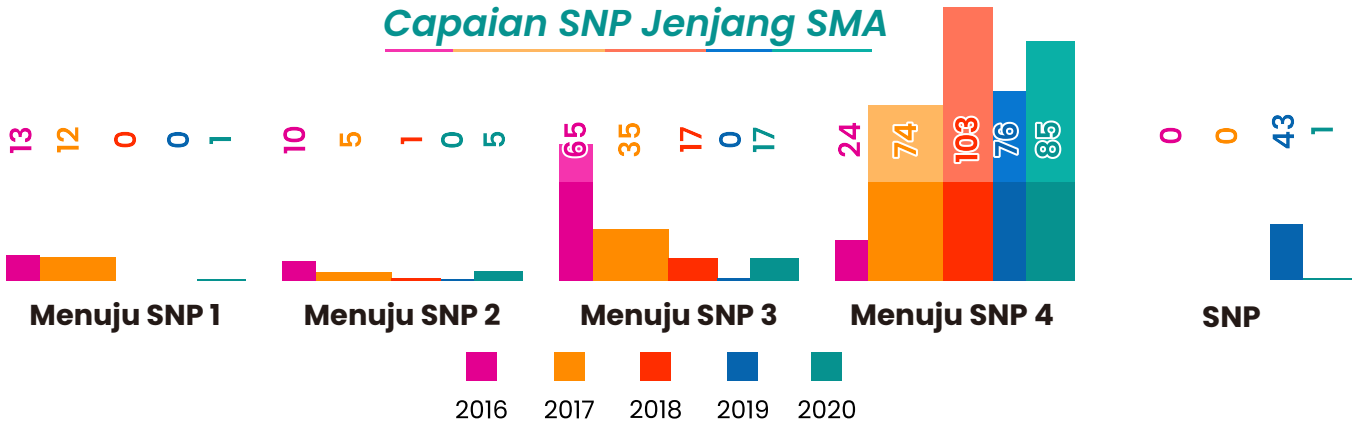

Data SNP

Capaian SNP Jenjang SLB

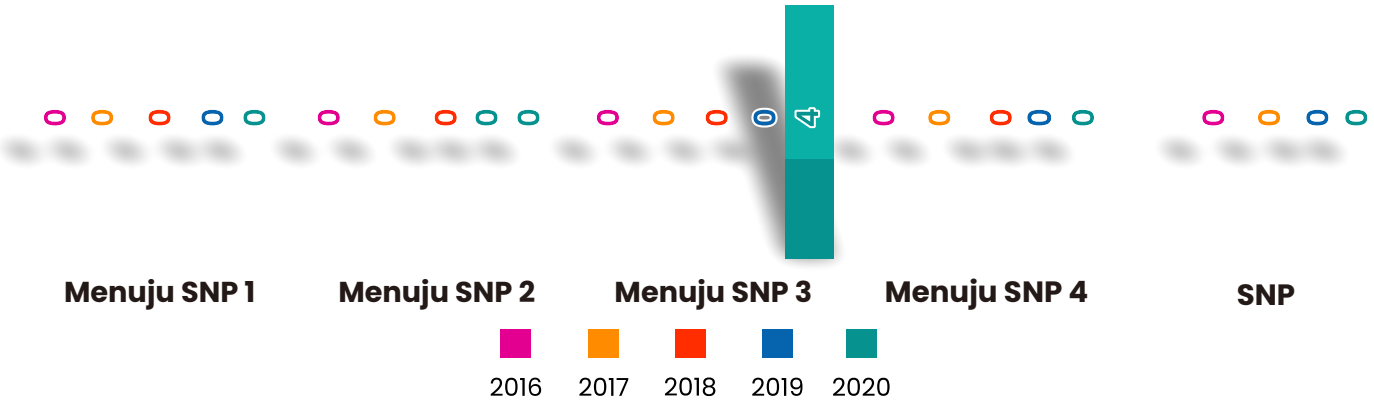

Nilai Akreditasi

JENJANG	A	B	C	TT	BT	JUMLAH
SD	245	455	232	16	22	970
SMP	119	149	99	7	31	405
SMA	61	60	18	6	15	160
SLB	0	8	5	0	7	20

Sumber : *https://dapomart.kemdikbud.go.id/ dan https://bansm.kemdikbud.go.id/akreditasi*

Data Asesmen Nasional

Hasil Asesmen Kompetensi Minimun di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021

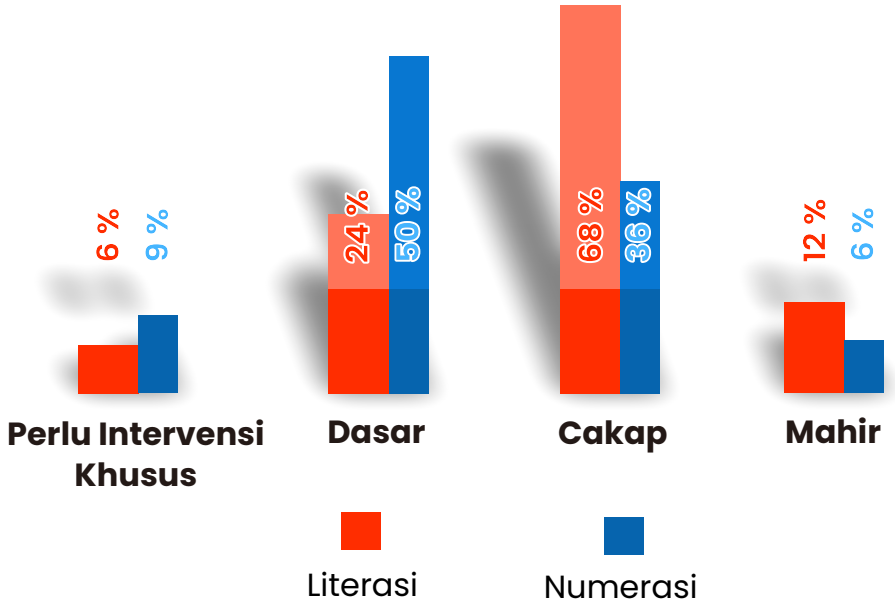

Data Asesmen Nasional

Hasil Survei Karakter di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021

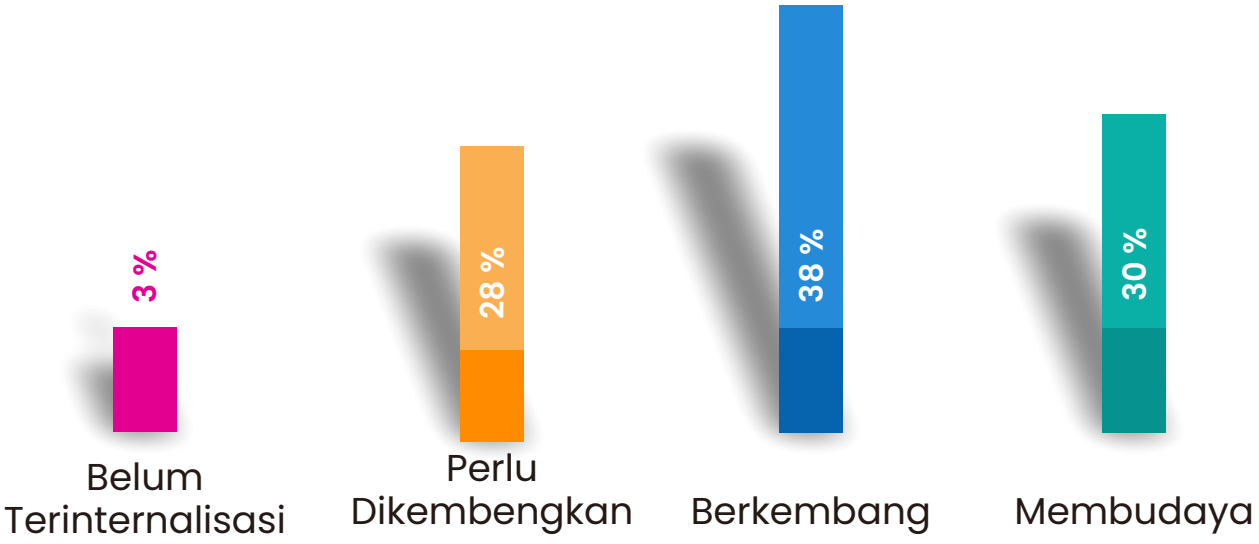

Kebijakan Pendidikan di Daerah

Sejak program penjaminan mutu Pendidikan melalui Program Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) dilaksanakan oleh LPMP Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016, Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Riau telah menerbitkan beberapa peraturan dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut.

No	Pemerintah Daerah	Peraturan Daerah		Penjaminan Mutu	Keterangan
1	Provinsi	Perda 2/2018	Penyelenggaraan Pendidikan	Pasal 21; 23	MBS melalui SPMI; dan kerjasama dengan UPT Pusat (LPMP)
2	Bintan	Perda 1/2018	Penyelenggaraan Pendidikan	Pasal 49; 16	Kewajiban sekolah melakukan penjaminan mutu; dan kerjasama Dinas dengan (LPMP)
3	Karimun	Perda 1/2017	Penyelenggaraan Pendidikan	Pasal 87	Kewajiban sekolah melakukan penjaminan mutu (jalur formal dan nonformal)
4	Lingga	Perda 7/2020	Penyelenggaraan Pendidikan	Pasal 123	Penjaminan mutu; LPMP; dan TPMPD
5	Kepulauan Anambas	Perda 3/2016	Sistem Penyelenggaraan Pendidikan	Pasal 11; 19; 29	Fasilitasi Pemda dalam PMP dan kerjasama dengan UPT Kemdikbud (LPMP)
6	Natuna	-		-	-
7	Batam	Perda 3/2019	Penyelenggaraan Pendidikan Dasar	Pasal 72	Kewajiban sekolah melakukan penjaminan mutu (akreditasi dan sertifikasi)
8	Tanjungpinang	Perda 9/2010	Sistem Penyelenggaraan Pendidikan	-	-

Sumber: *dari berbagai referensi sumber hukum (Pusat dan Daerah)*

Menindaklanjuti pelaksanaan program sekolah penggerak yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dimotori oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulaan Riau saat ini sedang dalam tahapan penyusunan peraturan gubernur terkait dengan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak.

Dokumentasi Kegiatan

Dokumentasi Kegiatan
Forum Pemangku Kepentingan Daerah
PSP Angkatan I di Kota Batam

Dokumentasi Kegiatan
Forum Pemangku Kepentingan Daerah
PSP Angkatan I di Kota Batam

Dokumentasi Kegiatan
Pendampingan Asesmen Nasional

Dokumentasi Kegiatan
Pendampingan Asesmen Nasional

Dokumentasi Kegiatan
Pendampingan Mahasiswa Program
Kampus Mengajar

Dokumentasi Kegiatan
Pendampingan Mahasiswa Program
Kampus Mengajar

Indikator kinerja #1.3. Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan

***Metode Perhitungan*:**

1. Akurat : (jumlah data akurat/ jumlah data) x 100%
2. Berkelanjutan : (jumlah satuan pendidikan dengan data seri tahunan/jumlah satuan pendidikan) x 100%
3. Terbarukan : (jumlah satuan pendidikan yang telah sinkron data/jumlah satuan pendidikan) x 100%

Σ (1+2+3)/3
Satuan: %
Tipe perhitungan: non kumulatif

Realisasi 2020	95,58
Target 2021	95,2
Realisasi 2021	100
Persentase Capaian	105,04 %
Target Akhir Renstra 2024	95,8
% Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra 2024	104,38

Berdasarkan data capaian tersebut, realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020. Capaian realisasi tahun 2021 telah mencapai 100%, hal ini menunjukan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau sudah memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan di atas 95%. Dengan demikian kualitas data pokok Pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau sudah baik yaitu akurat, mutakhir dan berkelanjutan. Data dikatakan Akurat bila data telah melalui tahap cleansing data (ganda, salah satuan, dsb), persentase diatas rata-rata 95%. Berkelanjutan bila pendataan dilakukan berkelanjutan dalam jangka waktu yang terus menerus dengan persentase diatas rata-rata 95%. Terbarukan bila pemutakhiran data dilakukan berkelanjutan dalam jangka waktu yang terus menerus dengan persentase diatas rata-rata 95%

RAPOR DAPODIK KABUPATEN/KOTA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021

Kota Batam	98,18
Kabupaten Bintan	99,22
Kabupaten Karimun	98,62
Kabupaten Anambas	98,55
Kabupaten Natuna	98,86
Kota Tj.Pinang	97,85
Kabupaten Lingga	99,04

RAPOR DAPODIK

98,62

Akurat : 97,48
Mutakhir : 99,77
Berkelanjutan: 98,61

PROVINSI KEPRI
TAHUN 2021

Sumber : https://dapomart.kemdikbud.go.id

Perbandingan Capaian Dapodik

RAPOR DAPODIK

98,42

Akurat : 96,72
Mutakhir : 99,47
Berkelanjutan: 99,08

NASIONAL
TAHUN 2021

RAPOR DAPODIK

98,62

Akurat : 97,48
Mutakhir : 99,77
Berkelanjutan: 98,61

PROVINSI KEPRI
TAHUN 2021

Capaian nilai dapodik Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2021 berada di atas capaian nilai dapodik nasional.

Besaran anggaran untuk mencapai target kinerja IKK 1.3 mengambil baseline pada program kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Mutu Pendidikan (Dapodik) melalui daring dengan realisasi sebagai berikut

Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
Rp 8.600.000	***Rp 8.600.000***	***100 %***

Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Mutu Pendidikan (Dapodik) melalui daring menghasilkan data pokok pendidikan dasar dan menengah yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau.

Upaya Pencapaian IKK. 1.3.

Kegiatan **Verifikasi dan Validasi Data Mutu Pendidikan (Dapodik)** melalui daring menghasilkan data pokok pendidikan dasar dan menengah yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau.

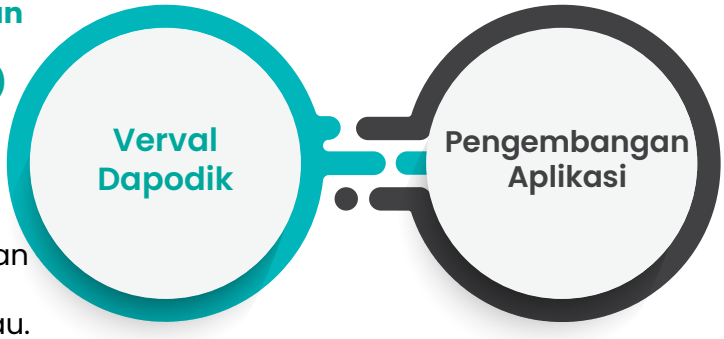

Kegiatan di Luar RKAKL. **Pengembangan Aplikasi Rapor Dapodik** Provinsi Kepulauan Riau

Kendala dan Solusi IKK 1.3.

Kendala	Solusi
Adanya **sekolah yang sudah tutup** atau tidak aktif **tetapi masih terdata** dalam sistem sehingga progres update data dapodik belum mencapai target.	Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi agar dapat menutup sekolah yang sudah tidak aktif dengan menerbitkan SK penutupan sekolah dan menutup di sistem dapodik Dinas Pendidikan terkait.
Sekolah masih kesulitan dalam mendeteksi **tingkat kualitas data** dalam dapodik.	Mengembangankan aplikasi rapor dapodik untuk mendeteksi kualitas dapodik dari segi akurasi, mutakhir dan berkelanjutan pada tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga satuan Pendidikan yang tidak terakomodir pada aplikasi dapodik pusat.

Dampak

Pemerintah daerah dapat menggunakan DAPODIK yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan sebagai bahan perencanaan peningkatan mutu Pendidikan di daerah

Pencapaian Sasaran Kegiatan

Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang di Provinsi Kepulauan Riau

Dasboard Aplikasi Rapor Dapodik LPMP Prov. Kepri

Inovasi ini dibangun dalam rangka mencapai target Dapodik di Provinsi Kepulauan Riau yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan. Aplikasi ini merupakan pengembangan dari aplikasi rapor dapodik yang dikembangkan oleh pusat, dengan menambahkan berbagai fitur sehingga dapat diakses oleh tingkat satuan pendidikan detail sampai capaian nilai per butir indikator.

Kelebihan Aplikasi Rapor Dapodik
yang dikembangkan Oleh LPMP Prov. Kepri

Aspek	Rapor Dapodik	Rapor Dapodik
Hak Akses	Terbatas sampai tingkat LPMP	Sampai Tingkat Satuan Pendidikan
Sajian Data	Terbatas pada rekap nilai provinsi dan kabupaten/kota	Detail per indikator sampai tingkat Kab/ Kota, Kecamatan, dan satuan pendidikan
Kemudahan akses	Susah diakses, server sering mengalami gangguan/down	Mudah diakses
	Pusat	LPMP Prov. Kepri

Dengan adanya pengembangan aplikasi Rapor Dapodik dari LPMP Provinsi Kepri ini dapat memberikan manfaat kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta satuan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau untuk melihat rapor dapodiknya secara detail sampai capaian nilai per indikator. Sehingga dapat ditindaklanjuti untuk ditingkatkan kualitas datanya dengan memperbaiki capaian indikator yang masih rendah.

Note

Penghitungan capaian persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan pada tahun 2020 berbasis satuan pendidikan, sedangkan untuk penghitungan tahun 2021 berbasis kabupaten/kota.

Dokumentasi Kegiatan

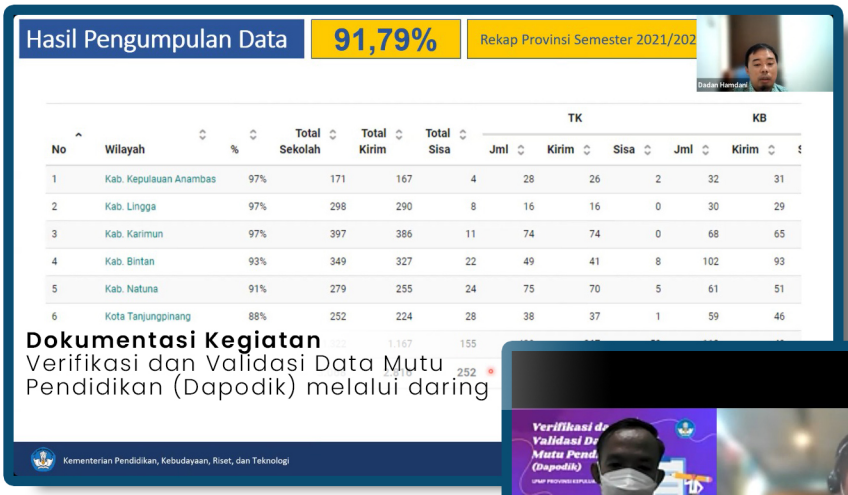

No	Wilayah	%	Total Sekolah	Total Kirim	Total Sisa	TK Jml	TK Kirim	TK Sisa	KB Jml	KB Kirim
1	Kab. Kepulauan Anambas	97%	171	167	4	28	26	2	32	31
2	Kab. Lingga	97%	298	290	8	16	16	0	30	29
3	Kab. Karimun	97%	397	386	11	74	74	0	68	65
4	Kab. Bintan	93%	349	327	22	49	41	8	102	93
5	Kab. Natuna	91%	279	255	24	75	70	5	61	51
6	Kota Tanjungpinang	88%	252	224	28	38	37	1	59	46

Dokumentasi Kegiatan
Verifikasi dan Validasi Data Mutu Pendidikan (Dapodik) melalui daring

Dokumentasi Kegiatan
Verifikasi dan Validasi Data Mutu Pendidikan (Dapodik) melalui daring

Dokumentasi Kegiatan
Verifikasi dan Validasi Data Mutu Pendidikan (Dapodik) melalui daring

Dokumentasi Kegiatan
Verifikasi dan Validasi Data Mutu Pendidikan (Dapodik) melalui daring

Sasaran #2. Terwujudnya Tata Kelola LPMP yang baik

Indikator kinerja #2.1. Nilai Minimal SAKIP LPMP Provinsi Kepulauan Riau

Capaian 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target Akhir Renstra 2024	%Capaian Realisasi Renstra 2024
BB	BB	BB	A	100 %

Nilai Sakip LPMP Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan data di samping, terlihat bahwa nilai sakip LPMP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun lalu, yaitu dari 76,97 dengan predikat BB menjadi 81,95 dengan predikat A dengan interpretasi Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.

Besaran anggaran untuk mencapai target Sakip LPMP Provinsi Kepulauan Riau mengambil baseline anggaran layanan umum pada program dukungan manajemen dengan realisasi sebagai berikut:

Realisasi Anggaran

PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI
Rp604.611.000	Rp603.775.000	99.86

Kegiatan/Program Dukungan Manajemen LPMP Provinsi Kepulauan Riau

01 Maret

- Penguatan Implementasi K3

02 April

- Reviu POS

03 Mei

- Penerbitan e-Buletin termin 1

04 Juni

- Bimtek Tata Naskah Dinas dan Persuratan
- Peningkatan Layanan Informasi melalui e-Jurnal dan e-Buletin
- Penerbitan e-Jurnal termin 1

05 Agustus

- Reviu Renstra LPMP tahun 2020-2024
- Penerbitan e-Buletin termin 2

06 September

- Peningkatan Layanan Informasi melalui ULT

07 Oktober

- Bimtek Pengelolaan Keuangan dan BMN
- Pendampingan SPI

08 November

- Penguatan SAKIP dan Persiapan Penyusunan LAKIP LPMP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021
- Penerbitan e-Jurnal termin 2 dan e-Buletin termin 3
- Studi Tiru ke Unit Kerja Yang Telah Mendapat Predikat Menuju WBK/WBBM Kota Batam

09 Desember

- IHT pegawai

Kegiatan Dukungan Manajemen LPMP Provinsi Kepulauan Riau

Keterlibatan pimpinan dan SDM LPMP dalam penyusunan rencana kinerja Menyusun dan mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja lembaga dan pegawai

Pelaksanaan rapat pencapaian kinerja setiap bulan dan triwulanan dan didokumentasikan di aplikasi spasikita

Penyusunan laporan kinerja dan laporan keuangan secara akurat dan tepat waktu

Rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan yang tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran tetapi sampai pada evaluasi capaian target kinerja tindak lanjut hasil evaluasi Sakip tahun 2020

Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

01 *Upaya Pencapaian Zona Integritas – WBK*

- Sosialisasi kepada Pegawai LPMP Provinsi Kepulauan Riau dan stakeholder
- Pencanangan LPMP Provinsi Kepulauan Riau sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi
- Pengusulan ke Setditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
- Persiapan Internal
- Pendampingan oleh Setditjen PAUD, DIkdas, dan Dikmen serta Tim Penilai Internal dari Kemendikbudristek
- Penilaian oleh tim dari Kemenpan RB.

02 *Peningkatan pelayanan dalam penggunaan dan layanan fasilitas LPMP Prov Kepri*

- Asrama untuk karantina pasien covid 19
- BAN S/M, BAN PAUD, dan Kantor Bahasa Prov. Kepri yang berkantor di lingkungan LPMP Provinsi Kepulauan Riau
- Penggunaan Laboratorium Komputer LPMP untuk Kegiatan Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Ujian PPG Kabupaten Bintan

03 *PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)*

- Sewa Ruang Kelas LPMP Provinsi Kepulauan Riau oleh Pondok Pesantren Darussilmi sebesar Rp. 111.000;
- Sewa Aula LPMP Provinsi Kepulauan Riau oleh Kemenag Kabupaten Bintan sebesar Rp 1.500.000;
- Sewa Gedung Aula LPMP Provnsi Kepulauan Riau Oleh FKUB Kab. Bintan sebesar Rp. 1.500.000;
- Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling (Lanjutan) LPMP Prov Kepri Tahun 2020 sebesar Rp. 6.757.031.

04 Pemberian Reward dan Punishment

Reward

PPNPN dengan Kinerja Terbaik

Staf ULT Terbaik Tahun 2021

Punishment

Surat Panggilan Staf yang melakukan Pelanggaran Disiplin

Kendala Pencapaian IKK 2.1

Nilai Evaluasi dan Nilai Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi yang kurang maksimal

Upaya Antisipasi/Solusi

- *Pembuatan Aplikasi Serasan untuk memonitor kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di LPMP dalam upaya pencapaian kinerja*
- *Pelaksanaan Rapat Rutin (triwulan) untuk mengetahui pencapaian kinerja dan sebagai bahan evaluasi perbaikan*

Dampak

Terwujudnya tata kelola LPMP Provinsi Kepulauan Riau yang berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan

Meningkatnya tata Kelola LPMP Provinsi Kepulauan Riau

INOVASI

LPMP PROVINSI KEPULAUAN RIAU

01 Serasan
Sistem Informasi Registrasi Kegiatan

02 Sempena
Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat

03 Selayar
Sistem Informasi Logbook Harian PPNPN LPMP Prov Kepri

04 Sitensip
Sistem Informasi Kompetensi Pegawai

05 Sepasi
Sistem Informasi Pendataan Vaksin PTK Kepulauan Riau

06 Rapor Dapodik
Rapor Dapodik Provinsi Kepulauan Riau

Motto:

Melayani dengan Hati, Sepenuh Hati, dengan Hati-hati, dan Tidak Sesuka Hati

Dokumentasi Kegiatan

Dokumentasi Kegiatan
Pendampingan ZIWBK dari inspektorat

Dokumentasi Kegiatan
Pendampingan ZIWBK dari inspektorat

Dokumentasi Kegiatan
Pendampingan ZIWBK dari setditjen pauddikdasmen

Dokumentasi Kegiatan
Revieu SAKIP Oleh Itjen

Dokumentasi Kegiatan
Revieu SAKIP oleh Internal LPMP Prov. Kepri

Dokumentasi Kegiatan
Kunjungan Menko PMK dan Gubernur Kepri Ke LPMP Prov. Kepri

Indikator kinerja #2.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL

Capaian 2020	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian 2021	Target Akhir Renstra 2024	% Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra 2024
97,18	96,91	82	118,18	85	114,01

Nilai Kinerja Anggaran LPMP Provinsi Kepulauan Riau 2019-2021

	IKPA	EKA	NKA
2019	98,44	92,53	94,89
2020	94,14	99,20	97,18
2021	98,12	96,91	96,04

Pada tahun 2021 LPMP Provinsi Kepulauan Riau memperoleh nilai kinerja anggaran sebesar 96,91 dari target nilai 82, yang menunjukkan bahwa capaian kinerja anggaran telah tercapai dengan realisasi 118,18%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020, capaian kinerja anggaran tahun 2021 mengalami sedikit penurunan, hal ini disebabkan karena nilai EKA khususnya pada komponen efisiensi yang dicapai kurang maksimal. Akan tetapi pada capaian nilai IKPA mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LPMP PROVINSI KEPULAUAN RIAU

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	Nilai EKA (SMART)				
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM				Penyerapan Anggaran	Konsistensi	Capaian Keluaran	Efisiensi	Nilai EKA
1	009	419511	LPMP PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	83.82	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.05	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	93.30	95%	98.21	99.62	99.94	100.00	14.53	96.04
				Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	0	5								
				Nilai Akhir	5.00	4.19	5.00	10.00	8.00	5.00	5.00	14.11	10.00	17.00	5.00	0.00	5.00								
				Nilai Aspek	94.61			100.00				98.51				100.00									

Disclaimer:
Sesuai PER 4/PB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output

Besaran anggaran mengambil baseline anggaran layanan perkantoran dan layanan sarana internal pada program dukungan manajemen dengan realisasi sebagai berikut:

Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
Rp10.538.865.000	Rp10.489.292.438	99,53

anggaran layanan perkantoran dan layanan sarana internal pada program dukungan manajemen digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Kantor, serta Belanja Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor dan Alat Pengolah data.

Upaya Pencapaian Optimal Nilai IKPA dan EKA

Pengelolaan keuangan dan Kepegawaian sesuai peraturan yang berlaku.

Pemantauan dan Evaluasi kegiatan yang berkelanjutan;

Penyesuaian anggaran dengan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui revisi anggaran dengan konsultasi dan koordinasi dengan Eselon I dan Kanwil DJPb;

Perencanaan pelaksanaan kegiatan yang terkoordinir;

Kendala Pencapaian IKK 2.2

Nilai efisiensi yang kurang maksimal. Nilai efisiensi dihitung dari capaian yang melebihi dari target dengan anggaran yang sama.

Upaya Antisipasi/Solusi

Penggunaan asrama sebagai tempat karantina covid-19 dan gedung LPMP sebagian juga digunakan oleh Kantor Bahasa, BAN PAUD dan PNF, serta BAN S/M Provinsi Kepulauan Riau menjadi nilai tambah bagi LPMP Provinsi Kepulauan Riau dari segi efisiensi, karena dengan anggaran yang ada LPMP Provinsi Kepulauan Riau dapat digunakan sebagai perkantoran dan layanan Kesehatan (asrama sebagai tempat karantina pasien covid19)

Dampak

Terwujudnya tata kelola LPMP Provinsi Kepulauan Riau yang berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan

Terwujudnya tata kelola LPMP Provinsi Kepulauan Riau yang berkualitas

REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran awal LPMP Provinsi Kepulauan Riau dalam DIPA tahun 2021 adalah senilai 16.534.631.000 dan mengalami 8 kali revisi DIPA sebagai berikut:

Roadmap Revisi Anggaran TA 2021

1. Rp16.534.631.000
Revisi Kanwil pergeseran belanja barang untuk belanja operasional, Revisi Hal 3 DIPA.

2. Rp16.534.631.000
Revisi Kanwil pergeseran belanja barang untuk belanja operasional, Revisi Hal 3 DIPA. Sekaligus melakukan pemutakhiran akun terkait Revisi POK sesuai surat persetujuan revisi anggaran dari eselon I tanggal 5 Maret 2021

3. Rp16.549.468.000
Revisi DJA perubahan pagu anggaran belanja pegawai terkait surat Dirjen PAUD, Dikdas dan Dikmen tentang Efisiensi Anggaran Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen Tahun 2021 tanggal 21 Mei 2021

4. Rp15.440.808.000
Revisi DJA perubahan pagu anggaran belanja pegawai dan belanja barang terkait Surat Menteri Keuangan No S-584/MK.02/2021 tentang Refocussing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 dan surat Dirjen PAUD, Dikdas dan Dikmen tentang Tindak Lanjut Pembentukan B2PMP tanggal 7 Juli 2021.

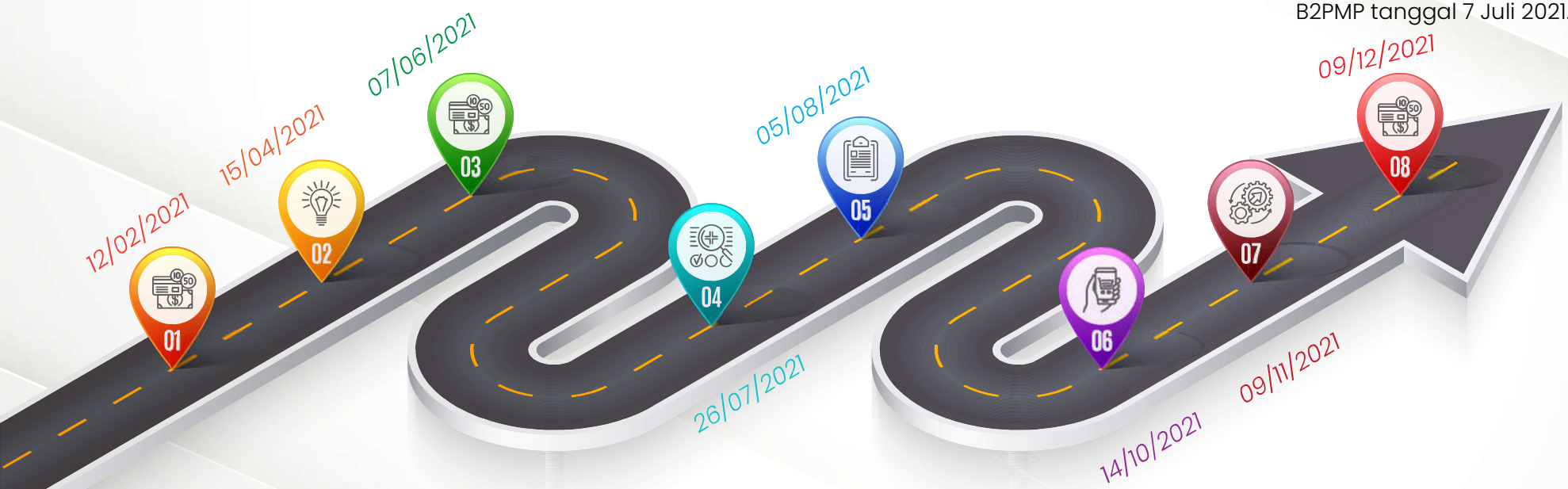

5. Rp14.598.408.000
Revisi DJA perubahan pagu anggaran belanja barang terkait Surat Menteri Keuangan No S-629/MK.02/2021 tentang Refocussing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 tahap IV

6. Rp14.598.408.000
Revisi Kanwil pergeseran belanja barang untuk belanja operasional, Revisi Hal 3 DIPA

7. Rp14.398.408.000
Revisi DJA perubahan pagu anggaran belanja terkait Surat Sekretaris Jenderal Nomor: 69243/A.A1/PR.06.00/2021 tanggal 10 Oktober 2021 tentang RefocusingAnggaran Kemendikbud-ristek TA 2021

8. Rp14.398.408.000
Revisi Kanwil terkait Pemutakhiran Data Akun

Realisasi
99,62

Efisiensi anggaran

Pada tahun 2021 LPMP Provinsi Kepulauan Riau berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar **Rp250.579.000.** Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari optimalisasi anggaran, kemudian dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai tugas dan fungsi utama LPMP dengan melibatkan pemangku kepentingan.

- **Pendampingan dan Monitoring Pelaksanaan Program Kampus Mengajar Angkatan 1 dan 2.** Hasil kegiatan ini adalah terdampinginya 296 mahasiswa yang ditempatkan pada 79 satuan pendidikan sasaran program kampus mengajar Angkatan 1 dan 2 di Kabupaten Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, serta Kota Batam dan Tanjungpinang. Lebih lanjut dari pendampingan ini diharapkan mutu Pendidikan di 79 satuan Pendidikan tersebut dapat meningkat.

- **Sosialisasi Kebijakan Merdeka Belajar (Program Sekolah Penggerak Angkatan 3 Tahun 2022) Secara Daring.** Hasil kegiatan ini adalah tersampaikannya informasi terkait Program Sekolah Penggerak Angkatan 3 di 7 Kab/Kota khususnya Kabupaten Lingga, Kepulauan Anambas, Karimun, dan Kota Tanjungpinang yang merupakan Kab/Kota yang menjadi sasaran baru di Program Sekolah Penggerak Angkatan 3. Lebih lanjut dari kegiatan ini diharapkan angka pendaftar Program Sekolah Angkatan 3 meningkat dibandingkan Angkatan 1 dan 2, selain itu diharapkan komitmen daerah untuk menyukseskan program sekolah penggerak meningkat.

- **Pendampingan Pelaksanaan Asesmen Nasional Tahun 2021 Jenjang SMK dan Paket C di Kota Tanjungpinang dan Batam, serta Kabupaten Bintan**. Tujuan dari kegiatan ini adalah memastikan bahwa 18 satuan Pendidikan jenjang SMK dan 1 SKB berpedoman pada Prosedur Operasional Staandar (POS) pelaksanaan asesmen nasional tahun 2021.

- **Diskusi Kelompok Terpumpun melalui Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi Berdasarkan SNP (Persiapan Pelaksanaan Vaksinasi bagi PTK serta Pengawas Sekolah) di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Riau.** Sebelum kegiatan ini, LPMP Provinsi Kepulauan Riau sudah membuat aplikasi Sepasi (Sistem Informasi Pendataan Vaksin PTK Kepulauan Riau) untuk mendata PTK yang sudah divaksin ataupun belum. Kegiatan ini menjadi sarana advokasi pada pemerintah daerah (Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan di 7 Kab/Kota dan Provinsi) untuk mempercepat progress vaksinasi PTK di Provinsi Kepulauan Riau dengan mengambil data dari aplikasi sepasi.

- **Tindak lanjut penyediaan fasilitas LPMP Provinsi Kepulauan Riau sebagai tempat observasi Covid 19.** Berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 195/SET-GTC19/VIII/2020 tanggal 1 Agustus 2020, tentang penggunaan asrama LPMP Provinsi Kepulauan Riau sebagai tempat observasi covid19. Dalam rangka mendukung penanganan pandemi covid19 di Provinsi Kepulauan Riau, LPMP Provinsi Kepulauan Riau melakukan beberapa persiapan terkait sarana prasarana yang akan digunakan

Selain efisiensi di atas, LPMP Provinsi Kepulauan Riau juga melakukan efisiensi sebesar Rp 2.136.223.000 melalui revisi anggaran terkait refocussing dan realokasi belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 seperti yang terlihat pada table roadmap revisi anggaran TA 2021.

Dokumentasi Penyediaan Asrarma LPMP Prov Kepri Sebagai Tempat Observasi Pasien Covid-19

BAB IV PENUTUP

Selama tahun 2021, LPMP Provinsi Kepulauan Riau berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.

	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Persentase
IKK 1.1	27.4 %	37,73 %	137,7 %	898.198.000	897.573.000	99,93
IKK 1.2	5 %	1,73 %	289,02 %	2.348.134.000	2.345.014.383	99,87
IKK 1.3	95,2 %	100 %	105,04 %	8.600.000	8.600.000	100
IKK 2.1	BB	A	137,7 %	604.611.000	603.775.000	99,86
IKK 2.2	82	96,91	118,18 %	10.538.865.000	10.489.292.438	99,53

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Kualitas data sekolah di Provinsi Kepulauan Riau perlu ditingkatkan
2. Kurangnya pemahaman Prosedur Operasional Standar (POS) Asesmen Nasional (AN) tahun 2021 khususnya jenjang Sekolah Dasar (SD)

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain:

1. Optimalisasi aplikasi rapor dapodik Provinsi Kepulauan Riau dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kualitas data pokok pendidikan.
2. Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk memaksimalkan sosialisasi POS AN ke sekolah-sekolah

LAMPIRAN:
Dokumen Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Riau
Dengan
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Irwan Safii, M.Pd.

Jabatan : Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Riau

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Jumeri, S.TP.,M.Si.

Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta,29 Januari 2021

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	**Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Riau**
Jumeri, S.TP.,M.Si.	**Drs. Irwan Safii, M.Pd.**

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SK 1] Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	[IKK 1.1] Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75	27.4
		[IKK 1.2] Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	5
		[IKK 1.3] Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	95.2
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola LPMP	[IKK 2.1] Predikat SAKIP	BB
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	82

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 11.497.728.000
2	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 5.036.903.000
		TOTAL	**Rp. 16.534.631.000**

Jakarta,29 Januari 2021

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Jumeri, S.TP.,M.Si.

Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Riau

Drs. Irwan Safii, M.Pd.

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Riau
Dengan
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Irwan Safii, M.Pd.

Jabatan : Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Riau

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Jumeri, S.TP.,M.Si.

Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Bintan,29 November 2021

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	**Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Riau**
Jumeri, S.TP.,M.Si.	**Drs. Irwan Safii, M.Pd.**

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SK 1] Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	[IKK 1.1] Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75	27.4
		[IKK 1.2] Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	5
		[IKK 1.3] Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	95.2
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola LPMP	[IKK 2.1] Predikat SAKIP	BB
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	82

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 3.254.932.000
2	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 11.143.476.000
		TOTAL	**Rp. 14.398.408.000**

Bintan,29 November 2021

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Jumeri, S.TP.,M.Si.

Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Riau

Drs. Irwan Safii, M.Pd.

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Dokumen Pengukuran Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021		Realisasi Tahun 2021		Anggaran Awal	Anggaran Revisi	Realisasi Anggaran	%
		Jumlah	Satuan	Capaian	%				
1. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75	26.5	%	37,73 %	137,7	3.334.799.000	898.198.000	897.573.000	99,93
	Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	5	%	1,73 %	289,02	1.122.296.000	2.348.134.000	2.345.014.383	99,87
	Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	95	%	100 %	105,04	579.808.000	8.600.000	8.600.000	100
2. Terwujudnya tata Kelola LPMP yang baik	Nilai Minimal SAKIP LPMP Provinsi Kepulauan Riau	BB		A		941.000.000	604.611.000	603.775.000	99,86
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL	82		96,91	118,18	10.556.728.000	10.538.865.000	10.489.292.438	99,52
TOTAL						**16.534.631.000**	**14.398.408.000**	**14.344.254.821**	**99,62**

Output dan Outcome Indikator Kinerja Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	OUTPUT	OUTCOME
Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75	26.5%	37,73 %	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan
Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	5%	1,73 %	
Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	95%	100 %	
Nilai Minimal SAKIP LPMP Provinsi Kepulauan Riau	BB	A	Terwujudnya tata Kelola LPMP yang baik
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL	82	96,91	

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LPMP PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN ***2021***

Kami telah mereviu laporan kinerja **LPMP Provinsi Kepulauan Riau** untuk tahun anggaran **2021** sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bintan, 28 Januari 2022
KETUA TIM PEREVIU

Ali Rahman Kaban, M.Pd.
NIP197709162003121002

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau

www.lpmpkepri.kemdikbud.go.id
lpmp.kepri@kemdikbud.go.id
0811 7799 16
JL. Tata Bumi Km.20 Ceruk Ijuk, Toapaya
Bintan, Kepulauan Riau